

RELEVANSI UU PANGAN NO. 18 TAHUN 2012

Menuju Ketahanan Pangan Berkualitas Berbasis Protein Hewani dan Berorientasi Kerakyatan

Ir. H. Herry Dermawan

Anggota DPR-RI Komisi IV

Amanat UU Pangan: Memastikan Pangan Hadir dan Berkualitas

Ketersediaan harus berjalan bersama keterjangkauan, mutu, keamanan, dan gizi.

KETERSEDIAAN

Pangan tersedia secara cukup dan berkelanjutan; peternakan merupakan bagian dari sistem pangan.

KETERJANGKAUAN

Pangan yang tersedia harus dapat diakses masyarakat dengan harga yang wajar.

MUTU & GIZI

Pemenuhan pangan harus mengarah pada pangan yang aman, bermutu, dan bergizi seimbang.

- Amanat UU No. 18 Tahun 2012: pangan merupakan kebutuhan dasar dan bagian dari hak asasi manusia.
- Penyelenggaraan pangan membutuhkan keterlibatan negara dan masyarakat dalam satu ekosistem.
- Protein hewani perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memenuhi pangan berkualitas.

Tantangan: Kebutuhan Gizi Bertemu dengan Realitas Produksi dan Daya Beli

Persoalan pangan bergizi bersifat lintas sektor — tidak cukup dijawab dari sisi produksi saja.

PRODUKSI

Produktivitas, kesinambungan pasokan, dan ketahanan terhadap gangguan harus diperkuat.

AKSES

Distribusi dan daya beli menentukan apakah pangan bergizi benar-benar sampai kepada masyarakat.

KUALITAS

Mutu, keamanan, dan kandungan gizi harus menjadi bagian dari penyelenggaraan pangan.

PELAKU

Peternak rakyat menghadapi skala usaha kecil, keterbatasan lahan, dan lemahnya pengorganisasian.

Tantangan kebijakan: bagaimana pangan bergizi menjadi terjangkau, sekaligus menciptakan nilai tambah bagi pelaku usaha rakyat?

Kedaulatan Pangan Harus Bertumpu pada Kekuatan Rakyat

Kebijakan pangan perlu memperkuat kemampuan produksi dalam negeri sekaligus posisi peternak rakyat.

KEDAULATAN PANGAN

Kemampuan bangsa menentukan kebijakan dan sistem pangan secara mandiri, sesuai kepentingan nasional dan potensi lokal.

KEMANDIRIAN PANGAN

Kemampuan memproduksi pangan dari dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.

- Peternak rakyat perlu diposisikan sebagai subjek utama pembangunan peternakan di daerah.
- Penguatan tidak hanya teknis budidaya: perlu organisasi, pengetahuan, akses pasar, dan posisi tawar.
- Lebih dari 98% ternak lokal Indonesia dimiliki komunitas peternak rakyat — penguatan mereka berarti memperkuat basis produksi pangan rakyat.

Negara Hadir: Bukan Menggantikan Usaha Rakyat, tetapi Membuatnya Tumbuh

PEMBIAYAAN

Akses modal yang sesuai karakter usaha dan mendorong investasi produktif.

TEKNOLOGI

Inovasi, pengetahuan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas.

PASAR

Akses pasar, kemitraan, dan penguatan posisi tawar dalam rantai nilai.

KELEMBAGAAN

Konsolidasi komunitas agar skala ekonomi dan daya tawar meningkat.

ARAH KEBIJAKAN

“Dari peternak sebagai objek kebijakan → menjadi subjek utama pembangunan peternakan dan pangan.”

Kolaborasi legislatif • pemerintah • akademisi • dunia usaha • lembaga keuangan • komunitas peternak

PANGAN BERGIZI • PETERNAK RAKYAT KUAT • DAERAH MANDIRI • INDONESIA BERDAULAT

DARI PETERNAK RAKYAT
UNTUK INDONESIA YANG LEBIH KUAT

PANGAN BERGIZI, RAKYAT SEHAT, INDONESIA MAJU

Menguatkan Peternak Rakyat,
Mewujudkan Kedaulatan Pangan



**KOMISI IV
DPR RI**
PERTANIAN
KEHUTANAN
KELAUTAN
DAN PANGAN



KETERSEDIAAN
Produksi dalam negeri
yang berkelanjutan



KETERJANGKAUAN
Harga yang wajar
untuk semua



BERMUTU & BERGIZI
Pangan aman,
sehat dan bergizi



**KEDAULATAN
DAN KEMANDIRIAN PANGAN**
Berkas potensi dalam negeri
dan pelaku usaha rakyat

**PETERNAK
KUAT
PANGAN
BERDAULAT**

“ Pangan adalah hak dasar rakyat
dan fondasi kedaulatan bangsa.

HERRY DERMAWAN
Anggota DPR RI | Komisi IV



**PETERNAK
RAKYAT**
Subjek utama
pembangunan
pangan



**REGULASI
& ANGGARAN**
Kebijakan yang
berpihak



**KEMITRAAN
YANG ADIL**
Hulu-hilir
berkeadilan



**INSENTIF &
FASILITASI**
Akses pembiayaan,
teknologi, pasar



**DAYA SAING
DAN KESEJAHTERAAN**
Peternak kuat,
Indonesia maju



BERPIHAK PADA RAKYAT



KOLABORATIF LINTAS SEKTOR



BERBASIS DATA DAN SOLUSI

**INDONESIA BERDAULAT
PANGAN KUAT
RAKYAT SEJAHTERA**